

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**RENJA
2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Jalan S. Sukowati Nomor 60 Telp/Fax (0732) 24662 Curup

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dengan Capaian RENSTRA DPMPTSP.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja DPMPTSP.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA DPMPTSP.
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bab V Penutup

DAFTAR TABEL

- TC 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2023.
- TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- TC 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.
- TC 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023.
- TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih perlu penyempurnaan namun demikian besar harapan semoga Rencana Kerja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang, untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini kami menerima kritikan dan saran bersifat membangun.

Terima Kasih.

Curup,

2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG



AFNISARDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630405199203 1015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026 (lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Kerja Tahun 2023 juga dirumus untuk mensinkronkan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah pada Tahun 2023 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan dalam bidang Penanaman Modal, pelayanan terpadu perizinan, perizinan non usaha, dan energi sumber daya mineral.

Penyusunan Renja sangat berpengaruh terhadap suksesnya pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Top-Down dan Bottom-Up maka perlu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan sehingga bias menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Mengingat pentingnya dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut meliputi:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja

keluaran(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Peranan Renja antara lain sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
2. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ini terdapat dua (2) tahapan yaitu :

1. Tahapan Penyusunan Renja OPD
2. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Menghimpun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan RenjaOPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Proses penyusunan Renja OPD, tidak terlepas keterkaitannya dengan dokumen Renstra OPD, dokumen RKPD dan proses penyusunan RAPBD di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Rencana Strategis (Renstra) OPD yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP

Kabupaten Rejang Lebong kepada Kepala Bappeda dan memperoleh pengesahan Bupati tersebut menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam penyusunan rancangan Renja OPD.

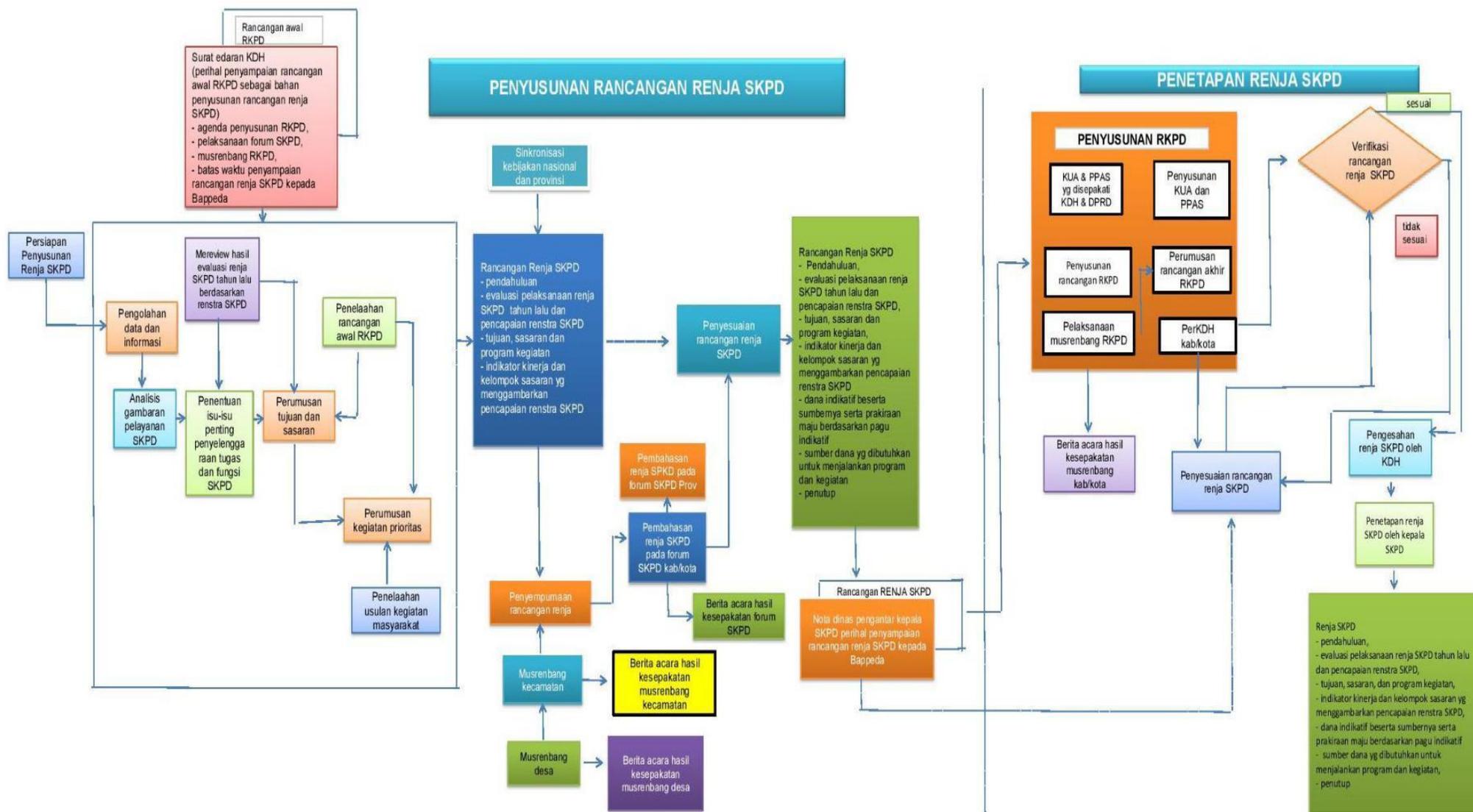
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 harus terukur dan dapat dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan demikian, alokasi sumber daya yang tersedia perlu dibatasi dengan pagu anggaran yang realistis berdasarkan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah agar tekanan pengeluaran tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dengan mempedomani Renstra Tahun 2021-2026 dan mengacu RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2021–2026 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)**”. Untuk mencapai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, berjumlah 9 (Sembilan) Misi Bupati Rejang Lebong, Pada misi Tersebut Dinas DPMPTSP Mengemban Misi Ke VIII (Delapan) yaitu: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP dan Berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, DPMPTSP menyusun program dan kegiatan berdasarkan program prioritas yang mengacu pada misi Kedelapan yaitu dengan Target **Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Rejang Lebong**. Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Bagan Alir. Tahapan Penyusunan Renja DPMPTSP



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan daerah nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
 9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah untuk mengetahui:

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2023.
4. Mengetahui Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.
2. Mengevaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022
- II.2. Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Menjelaskan uraian Dari TC.33.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakan

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan keuangan sesuai DPA Tahun 2022 Rp. **3.442.728.094** dan diubah dalam Perubahan Anggaran DPA-Perubahan yaitu sebesar Rp **3.984.921.228,-** dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp. **3.765.374.288,-** atau sebesar 94 % yang berarti masuk dalam kategori berhasil. Adapun rincian Perprogram dan Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dengan melihat evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tahun sebelumnya dan jika dilihat dari serapan anggaran tahun 2022, Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

TABEL TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nama Perangkat daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program (autcomes) Kegiatan/(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n - 1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capai Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 4/10
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	B	B	100%	B	B	100%
2.18.01.2.02.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN ; Tersedianya honorarium THL	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.07.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.18.01.2.07.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.07.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.08.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	0%	-	-	0%
2.18.01.2.08.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.08.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2.18.01.2.08.03	Pengadaan Mebel	Jumlah/jenis mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	2 Unit	-	0%	4 Jenis	2 Unit	0%
2.18.01.2.09.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%							
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.02.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.02.2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.02.2.01.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	105%	105%	100%	105%	105%
2.18.02.2.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Dinas jabatan yang terpelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	17 Unit	94%	18 Unit	18 Unit	100%

2.18.02.2.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.18.02.2.02.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400.000.000.000	77.730.760.027	19%	464,71 M	77.730.760.027	19%
2.18.03	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rejang Lebong	30	55	62	55	113%	30	55	0%
2.18.03.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 PERDA	-	-	-	0%	1 PERDA	-	0%
2.18.03.2.01.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rejang Lebong	30	55	62	55	113%	30	55	0%
2.18.04	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 PERDA	-	1 PERDA	-	0%	1 PERDA	1 PERDA	100%
2.18.04.2.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah	1 Buku dan 1 Film	-	-	-	0%	-	1 Buku dan 1 Film	100%
2.18.024	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400.000.000.000	77.730.760.027	19%	464,71 M	77.730.760.027	19%
2.18.04.2.01.03	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	-	-	-	5%	-	0%
2.18.05.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	1 Kali	-	1 Kali	-	0%	1 Kali	1 Kali	100%
2.18.05	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400.000.000.000	77.730.760.027	19%	464,71 M	77.730.760.027	19%

2.18.05.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terciptanya Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05.2.01.02	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	100%	1 Data	1 Data	100%
2.18.05.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Buku Laporan	2 Buku Laporan	2 Buku Laporan	2 Buku Laporan	100%	2 Buku Laporan	4 Buku Laporan	200%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400.000.000.000	77.730.760.027	19%	464,71 M	77.730.760.027	19%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan LKPM	30	55	62	55	113%	30	55	113%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 data	100%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi dan bimtek penanaman modal aplikasi OSS dan BKPM online	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. Rp. 4.998.600,- (100%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 4.998.600,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah tersedianya Tiga (3) Dokumen Laporan Perencanaan dan Pelaporan (Renja 2022, dan PK, rencana Aksi)

2) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah

tersedianya sepuluh (10) Dokumen Laporan Perencanaan dan Pelaporan. yang dianggarkan sebesar Rp. 4.998.600,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah tersedianya Tiga (3) Dokumen Laporan Perencanaan dan Pelaporan (DPA Murni, DPA Pergeseran, DPA Perubahan).

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 0 Perda, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 13.877.890,- (99%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 13.979.890,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tidak tercapai Disebabkan Belum Adanya Perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang menjadi dasar Untuk Membuat Perda Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal, Serta Kurangnya Ketersediaan Anggaran untuk Melakukan Kajian Akademis Rancangan Perda/Perbup Tersebut.

2) Sub. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran adalah 0 Perda RUPM, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 13.877.890,- (99%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 13.979.890,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tidak tercapai Disebabkan Kurangnya Ketersediaan Anggaran untuk Melakukan Kajian Akademis Rancangan Perda/Perbup RUPM Tersebut.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran adalah 0 Kegiatan Promosi Yang di ikuti, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 8.327.000,- (98%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 8.479.010,-. Pencapaian kinerja di dalam

Sub Kegiatan ini tidak tercapai Disebabkan Kurangnya Ketersediaan Anggaran untuk Kegiatan Promosi Tersebut. Dengan Pagu yang Ada DPMPTSP tidak dapat Mengikuti Kegiatan Promosi Tersebut.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 1) Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai 1 Data, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 186.592.950,- (68%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 276.332.600,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tercapai Namun Realisasi Serapan Anggaran Kurang Maksimal dikarenakan Honorarium Tim External Tidak bisa dibayarkan berdasarkan rekomendasi tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan Ada Beberapa Silpa Anggaran Sub.Kegiatan yang tidak Bisa dibelanjakan.

2) Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai 1 Laporan, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 39.628.100,- (99%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 40.028.100,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tercapai Karena tidak ada laporan Pengaduan Pada Tahun 2022 yang terekap di DPMPTP.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai (270%) tercapai 73 Pelaku Usaha, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 62.196.900,- (100%) dari target yang

dianggarkan sebesar Rp. 62.196.900,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini telah melebihi dari target Renstra 27 Pelaku usaha .

2) Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai (120%) tercapai 220 Pelaku Usaha, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 302.794.000,- (91%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 331.044.000,- sisa 9% merupakan SILPA Kegiatan yang tidak terpakai. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini telah melebihi dari target Renstra yaitu 220 Pelaku usaha dari target 182 Pelaku Usaha.

3) Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai (221%) tercapai 73 Kegiatan Usaha, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 50.505.000,- (88%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 57.610.000,- sisa 12% merupakan SILPA Kegiatan yang tidak terpakai.

Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini telah melebihi dari target Renstra yaitu 73 Kegiatan usaha dari target 33 Kegiatan Usaha.

- **Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota** realisasi Kinerja sebesar 92% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.087.608.830 (98%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.181.270.838,-, Realisasi Kinerja sebesar 92,31% Pencapaian Target capaian Kinerja di tunjang Oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana Capaian SAKIP DPMPTSP yaitu 68,51 dengan Predikan B (Baik) atau realisasi capaian sebesar 97,87% dari Target. Adapun Kekurangan realisasi Kinerja di sebabkan satu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Pengadaan 1 unit Komputer, dan 1 Unit Printer tidak Direalisasikan, terkendala Standar Harga SSH di DPA sudah tidak Relefan dengan Harga Pasar Saat itu dimana harga pasar lebih tinggi dari harga SSH sehingga Pagu anggaran di alihkan ke Sub.kegiatan yang lain yang lebih prioritas.

- **Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.755.780 (99%) dari pagu anggaran sebesar Rp.27.959.780,-, Realisasi Kinerja sebesar 0% capaian Kinerja Adapun tidak terealisasi di sebabkan Kedua Sub Kegiatan Tersebut Tidak Tercapai Target, Hal ini di sebabkan Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dimana untuk membuat ke dua Perda tersebut dibutuhkan Kajian Akademis Oleh tenaga Ahli.
- **Pada Program Promosi Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.327.000 (98%) dari pagu anggaran sebesar Rp.8.479.010,-, Realisasi Kinerja sebesar 0% Penyebab tidak terealisasi Kinerja, di sebabkan Kurangnya Anggaran untuk Mengikuti kegiatan tersebut dimana untuk Mengikuti Kegiatan Promosi tersebut dibutuhkan Anggaran Sekurang-kurangnya 150 Juta Lebih, sedangkan Pagu Anggaran yang tersedia hanya Rp.8.479.010,-.
- **Pada Program Pelayanan Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 226.221.050 (83,5%) dari pagu anggaran sebesar Rp.316.360.700,-, Tercapainya Capaian Kinerja sebesar 99%,

didukung Oleh Nilai Capaian Survey Keupasan Masyarakat (SKM) Tahun Ini senilai 85,60 dengan Predikat Baik, adapun silpa Anggaran 16,5 % merupakan sisa Kegiatan yang tidak bisa di Belanjakan.

- **Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 203% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 415.461.628 (93%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 450.850.900,-, Tercapainya Capaian Kinerja sebesar 203%, didukung Oleh Nilai Capaian ke Tiga Sub Kegiatan dengan capaian Realisasi melebihi target awal tahun.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, maka peranan DPMPTSP sangat penting dalam Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal yang sudah berjalan dengan baik, dan Untuk Menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, hal tersebut ditandai dengan indikator Kinerja DPMPTSP sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	0,57 %
2.	Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	2 %
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	75
4.	Nilai SAKIP DPMPTSP	B
5.	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	100 %

Persentase Peningkatan Nilai Investasi

- Tercapainya Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Rejang Lebong Tahun 2022 dengan capaian Realisasi Nilai Investasi sebesar 7,94% dari Target sebesar 0,57%, capaian ini merupakan indikator Peningkatan Nilai Investasi di Rejang Lebong. Peningkatan tersebut diperoleh dari data Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan Laporan Peningkatan Realisasi Investasi di Rejang Lebong Tahun 2022 yang di laporkan Oleh Para Pelaku Usaha di Rejang Lebong ke Dalam Aplikasi LKPM.

- **Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong**

Tercapainya Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong Tahun 2022 dengan capaian Realisasi Nilai Investasi sebesar 138,49% dari Target sebesar 2%, capaian ini merupakan indikator Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong Tahun 2022, dan pada Tahun 2021 Nilai Investasi -47,12 % dari Target 2%. Peningkatan/Penurunan tersebut diperoleh dari Aplikasi dari data Aplikasi Online Single Submission (OSS). yang merupakan Laporan Rencana Investasi Pelaku Usaha di Rejang Lebong Tahun 2022 yang di laporkan Oleh Para Pelaku Usaha di Rejang Lebong ke Dalam Aplikasi OSS hal tersebut Berindikasi terjadi Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong Meningkat.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik**
Tercapainya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi IKM sebesar 96,95% dari Target sebesar 100%, capaian ini merupakan Capaian Rata-Rata IKM tahun 2022, yang merupakan Hasil Penilaian Quisioner SKM yang di ambil dari Penilaian masyarakat yang berurusan ke DPMPTSP. Meskipun belum tercapai 100% dari Target namun Capaian Tersebut Sudah Meningkat Dari Tahun Sebelumnya, yaitu sebesar **80,38** tahun 2021, dan meningkat menjadi **85,60** pada tahun 2022.

- **Nilai SAKIP DPMPTSP**

Tercapainya Persentase Nilai SAKIP Pada Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi SAKIP sebesar (68,51) Bernilai Baik atau terealisasi sebesar 97,87% dari Target sebesar 100%, capaian ini diperoleh dari Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022. Meskipun belum tercapai 100% dari Target namun Capaian Tersebut Sudah Meningkat dibandingkan Tahun Sebelumnya.

- **Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi**

Tercapainya Persentase Inovasi DPMPTSP Pada Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi Inovasi DPMPTSP sebesar 100% dari Target sebesar 100%, capaian ini diperoleh dengan membuat Satu Inovasi LAPOKSA (Layanan Pelaporan Kegiatan Usaha), dimana Inovasi ini untuk memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha dalam melaksanakan kewajiban melakukan Pelaporan Kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap Periode sehingga Target Realisasi Investasi Rejang Lebong dapat tercapai.

TABEL T - C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn + n)	Tahun 2024 (thn n + 2)	Tahun 2025 (thn n + 3)	Tahun 2026 (thn n + 4)	Tahun 2021 (thn n- 2)	Tahun 2022 (thn n- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	-	-	462,07 M	464,71 M	464,87 M	471,58 M	476,28 M	483,71 M	86 M	110 M	86 M	100 M	Target adalah Jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dikali 100%
2	Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	-	-	15%	5%	6,5%	10%	12,5%	15,5%	-47,12%	318,90%	0,57%	6,5%	Target adalah Jumlah investasi Perusahaan tahun n dikurang jumlah investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%
3	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	-	-	75	75	75	75	75	75	80,38	85,60	75	75	Target Adalah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
5	Nilai SAKIP DPMPTSP	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Target Adalah Nilai Sakip DPMPTSP
6	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target Adalah Capaian Inovasi yang di Peroleh

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Menciptakan aplikasi pengelolaan system informasi manajemen administrasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan SOP teknis terkait;
3. Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan professional dibidang perizinan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Meningkatkan jenis perijinan dan non perizinan yang dilayani;
7. Menyederhanakan persyaratan dan alur perijinan dan non perizinan yang ada.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya Laporan Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP. Salah satunya belum didukung dengan aplikasi Pelaporan pengaduan sehingga masyarakat yang akan melaporkan pengaduan harus mendatangi DPMPTSP terlebih dahulu;

2. Alokasi anggaran Renstra DPMPTSP tidak mendukung Kegiatan Dimana Untuk Mencapai Target Kinerja Renstra Dibutuhkan Anggaran yang Tidak Sedikit;
3. Realise Hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Aplikasi BKPM yang selalu lambat. Sehingga Pelaporan Realisasi Capaian Realisasi Nilai Investasi Tidak Akurat karna Baru Sampai Semester III, Dimana Laporan Akhir Semester IV selalu Terlambat;
4. Belum adanya Perda RDTR dimana Perda Tersebut berfungsi sebagai dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Tanpa adanya dokumen RDTR maka dokumen tersebut tidak dapat dikeluarkan. Jika sebelumnya untuk mendirikan bangunan diperlukan IMB, maka kini telah berganti menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Meskipun telah berganti istilah, namun tetap memiliki fungsi yang sama.
5. Belum Adanya Perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Rejang Lebong sehingga masih terjadi tumpang tindih antar sector dalam penetapan prioritas sektor-sektor Penanaman Modal yang akan dipromosikan.

Sehubungan dengan telah Memasuki Tahun Ke 3 RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, dan RENSTRA DPMPTSP maka RENJA Tahun 2023 seharusnya telah memenuhi Beberapa Target Capaian Renstra Sehingga Target RPJMD akhir Tahun bisa Tercapai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program kegiatan. Hal terpenting adalah sinkronisasi antara program kegiatan yang terdapat dalam Renja DPMPTSP dengan Renstra DPMPTSP. Disinilah letak dan fungsi perencanaan pada sebuah OPD dalam menentukan program kegiatan. Usulan kegiatan yang adakn di tentukan Skala Priorotas untuk Diaggarkan pada saat penyusunan RKPD. Kesiambungan pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat sangat membantu dalam mencapai visi dan misi DPMPTSP.

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2023 ini, DPMPTSP sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) permuktahiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel TC. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2021
Tahun 2023

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat dan tepat waktu	100%	2.943.706.782	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat dan tepat waktu	100%	2.943.706.782	-		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10.000.000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5.000.000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	5.000.000	
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	2.678.774.915	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	2.678.774.915	-	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	2.471.864.915	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	2.471.864.915	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	206.910.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	206.910.000	
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	105.851.307	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	105.851.307		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	3.000.000	-
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	2 Paket	22.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	2 Paket	22.000.000	-
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 Paket	20.000.000	-
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			-
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.851.307	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.851.307	-
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100%	10.000.000	-	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket mebel yang disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Paket mebel yang disediakan	-	-	-

2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	10.000.000	-
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	109.080.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	109.080.560	-
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000	-
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	84.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	84.520.000	-
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	10.000.000	-
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang di sediakan	12 Laporan	10.060.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang di sediakan	12 Laporan	10.060.560	-
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	30.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	30.000.000	-
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya	18 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya	18 Unit	25.000.000	-
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	-
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	100%	67.628.128	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	100%	67.628.128	-
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 PERDA	15.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 PERDA	15.000.000	-
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	1 PERDA	15.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	1 PERDA	15.000.000	-
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 PERDA	52.628.128	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 PERDA	52.628.128	-
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 PERDA	15.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 PERDA	15.000.000	-
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah	1 Buku dan 1 Film	37.628.128	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah	1 Buku dan 1 Film	37.628.128	-
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	100%	10.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	100%	10.000.000	-
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pameran / even promosi	100%	10.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pameran / even promosi	100%	10.000.000	-
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	1 Kali	10.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R.L	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	1 Kali	10.000.000	-
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pelayanan penanaman modal	100%	123.229.400	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R.L	Persentase pelayanan penanaman modal	100%	123.229.400	-

2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP Kab.R L	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	100%	123.229.400	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP Kab.R L	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	100%	123.229.400
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	1 Data	83.196.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	1 Data	83.196.000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 Predikat	40.033.400	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 Predikat	40.033.400
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R L	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	100%	388.319.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP Kab.R L	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	100%	388.319.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R L	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	100%	388.319.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab.R L	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	100%	388.319.000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	27 Kegiatan Usaha.	48.300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	27 Kegiatan Usaha.	48.300.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	182 Pelaku Usaha	243.419.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	182 Pelaku Usaha	243.419.000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	33 Kegiatan Usaha	96.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	33 Kegiatan Usaha	96.600.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis), sedangkan usulan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis), LSM, asosiasi - asosiasi ,perguruan tinggi dan usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan, sampai Saat penyusunan Renja 2023 ini Tidak ada Usulan Pada Proses Musrenbang Kabupaten.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC 32 Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023.

TABEL TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong sebagai Dinas Teknis yang mempunyai Tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dan Sub Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu Untuk Menyelaraskan dengan Visi Misi Kepala Daerah di dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2021-2026, Maka DPMPTSP Berperan Aktif agar pembangunan bidang Peningkatan Investasi daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat Tercapai Target, Serta dampak capaian Target tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong

Dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu ini telah Mendukung Visi Misi Kepala Daerah Untuk mencapai Target yang di inginkan. Penetapan Kebijakan penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong juga di susun mengacu kepada kebijakan pemerintah Pusat.

Adapaun Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian Program prioritas Nasional bagi DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah Peningkatan Nilai Investasi. Guna mendukung

pencapaian Target Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) yang bersumber dari data realisasi investasi Provinsi, Kota Dan Kabupaten tersebut nantinya akan di dukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Indikator Kinerja di arahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas pelayanan publik;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indicator kinerja yaitu **Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang Pelayanan Perizinan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;
- b. Terciptanya system dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana;
- c. Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;

- d. Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa;
- e. Membangun system informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi;
- f. Tersedianya media informasi publik melalui jaringan internet;
- g. Menyebarkan data dan informasi tentang perizinan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Menerapkan sitem pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan dengan rentang waktu penyelesaian yang pasti;
- c. Melakukan sosialisasi tentang sistem dan prosedur pelayanan perizinan;
- d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman perizinan dan non perizinan;
- e. Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penanaman modal;
- f. Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perizinan;
- g. Membangun kantor yang representative dan mudah dijangkau masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Mempunyai Misi "**Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama**". Guna Mewujudkan Visi Kabupaten Rejang Lebong di

Tetapkan Misi beserta Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima) Tahunan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

Penjabaran Pelaksanaan Misi Bupati yang dilaksanakan Oleh DPMPTSP

Misi 6 : Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Nilai SAKIP

Misi 8 : Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif.	
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 berdasarkan pemetaan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

I. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

II. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

I. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

II. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel TC 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
2	18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.943.706.782,00		100%	2.981.334.910,00
2	18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R L	100%	10.000.000,00	-	100%	10.000.000,00
2	18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R L	3 dokumen	5.000.000,00		3 dokumen	5.000.000,00
2	18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab.R L	10 dokumen	5.000.000,00	-	10 dokumen	5.000.000,00
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R L	100%	2.678.774.915,00		100%	2.678.774.915,00
2	18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab.R L	29 Orang	2.471.864.915,00		29 Orang	2.471.864.915,00
2	18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab.R L	12 Dokumen	206.910.000,00	-	12 Dokumen	206.910.000,00
2	18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab.R L	100%	105.851.307,00	-	100%	115.851.307,00
2	18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab.R L	1 Paket	3.000.000,00	-	1 Paket	3.000.000,00

2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L			-		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	60.851.307,00	-	12 Laporan	70.851.307,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	DPMPTSP Kab.R L	100%	10.000.000,00	-	100%	22.628.128,00
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L	-	-	-	2 Paket	5.000.000,00
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Laninnya yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L	2 Unit	10.000.000,00	-	2 Unit	17.628.128,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	DPMPTSP Kab.R L	100%	109.080.560,00	-	100%	109.080.560,00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	4.500.000,00	-	12 Laporan	4.500.000,00
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	84.520.000,00	-	12 Laporan	84.520.000,00
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	10.000.000,00	-	12 Laporan	10.000.000,00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	10.060.560,00	-	12 Laporan	10.060.560,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	DPMPTSP Kab.R L	1	30.000.000,00	-	1	45.000.000,00
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya	DPMPTSP Kab.R L	18 Unit	25.000.000,00		18 Unit	25.000.000,00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	DPMPTSP Kab.R L	1 Unit	5.000.000,00		1 Unit	20.000.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal		100%	67.628.128,00		100%	30.000.000,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	DPMPTSP Kab.R L	1 PERDA	15.000.000,00		1 PERDA	15.000.000,00
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	1 PERDA	15.000.000,00		1 PERDA	15.000.000,00

2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	DPMPTSP Kab.R L	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	DPMPTSP Kab.R L	1 Kali	10.000.000,00		1 Kali	10.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal		100%	123.229.400,00		100%	123.229.400,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	DPMPTSP Kab.R L	1	123.229.400,00		1	123.229.400,00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	DPMPTSP Kab.R L	1 Data	83.196.000,00		1 Data	83.196.000,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP Kab.R L	100 Predikat	40.033.400,00		100 Predikat	40.033.400,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur		100%	388.319.000,00		100%	388.319.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	DPMPTSP Kab.R L	1	388.319.000,00		1	388.319.000,00
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	27 Kegiatan Usaha.	48.300.000,00		27 Kegiatan Usaha.	48.300.000,00
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	182 Pelaku Usaha	243.419.000,00		182 Pelaku Usaha	243.419.000,00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP Kab.R L	33 Kegiatan Usaha	96.600.000,00		33 Kegiatan Usaha	96.600.000,00
					TOTAL				3.532.883.310,00			2.991.334.910,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP).

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari dana APBD Murni dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan program dan kegiatan sebagai berikut tertuang dalam table TC 33 dibawah ini :

Tabel TC 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2	18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.943.706.782,00		100%	2.981.334.910,00
2	18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP TSP Kab.R L	100%	10.000.000,00	-	100%	10.000.000,00
2	18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMP TSP Kab.R L	3 dokumen	5.000.000,00		3 dokumen	5.000.000,00
2	18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP TSP Kab.R L	10 dokumen	5.000.000,00	-	10 dokumen	5.000.000,00
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP TSP Kab.R L	100%	2.678.774.915,00		100%	2.678.774.915,00
2	18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMP TSP Kab.R L	29 Orang	2.471.864.915,00		29 Orang	2.471.864.915,00
2	18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMP TSP Kab.R L	12 Dokumen	206.910.000,00	-	12 Dokumen	206.910.000,00
2	18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP TSP Kab.R L	100%	105.851.307,00	-	100%	115.851.307,00
2	18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMP TSP Kab.R L	1 Paket	3.000.000,00	-	1 Paket	3.000.000,00

2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L			-		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	60.851.307,00	-	12 Laporan	70.851.307,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	DPMPTSP Kab.R L	100%	10.000.000,00	-	100%	22.628.128,00
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L	-	-	-	2 Paket	5.000.000,00
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Laninnya yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L	2 Unit	10.000.000,00	-	2 Unit	17.628.128,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	DPMPTSP Kab.R L	100%	109.080.560,00	-	100%	109.080.560,00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	4.500.000,00	-	12 Laporan	4.500.000,00
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	84.520.000,00	-	12 Laporan	84.520.000,00
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	10.000.000,00	-	12 Laporan	10.000.000,00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	DPMPTSP Kab.R L	12 Laporan	10.060.560,00	-	12 Laporan	10.060.560,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	DPMPTSP Kab.R L	1	30.000.000,00	-	1	45.000.000,00
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya	DPMPTSP Kab.R L	18 Unit	25.000.000,00		18 Unit	25.000.000,00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	DPMPTSP Kab.R L	1 Unit	5.000.000,00		1 Unit	20.000.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal		100%	67.628.128,00		100%	30.000.000,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	DPMPTSP Kab.R L	1 PERDA	15.000.000,00		1 PERDA	15.000.000,00
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	1 PERDA	15.000.000,00		1 PERDA	15.000.000,00

2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	DPMPTSP Kab.R L	1	10.000.000,00		1	10.000.000,00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	DPMPTSP Kab.R L	1 Kali	10.000.000,00		1 Kali	10.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal		100%	123.229.400,00		100%	123.229.400,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	DPMPTSP Kab.R L	1	123.229.400,00		1	123.229.400,00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	DPMPTSP Kab.R L	1 Data	83.196.000,00		1 Data	83.196.000,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP Kab.R L	100 Predikat	40.033.400,00		100 Predikat	40.033.400,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur		100%	388.319.000,00		100%	388.319.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	DPMPTSP Kab.R L	1	388.319.000,00		1	388.319.000,00
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	27 Kegiatan Usaha.	48.300.000,00		27 Kegiatan Usaha.	48.300.000,00
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab.R L	182 Pelaku Usaha	243.419.000,00		182 Pelaku Usaha	243.419.000,00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP Kab.R L	33 Kegiatan Usaha	96.600.000,00		33 Kegiatan Usaha	96.600.000,00
					TOTAL				3.532.883.310,00			2.991.334.910,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD seharusnya disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan telah Memasuki Periode ke Empat RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan RENSTRA PD maka RENJA Tahun 2023 harus memperhatikan kesesuaian dengan arahan Program prioritas Pusat, Program Prioritas Propinsi dan Program Sementara Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadi berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil.

Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Renstra yang telah disusun dan mendukung visi misi Bupati terpilih, sehingga program kerja akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

